

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BUMDES adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDES sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUMDES sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha. BUMDES sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (bahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. (Wijaya, David 2018)

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat

menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang handal adalah pilar paling akhir pendukung perekonomian desa demokratis. Ketetapan pemilihan jenis BUMDes, jenis kegiatan usaha, struktur organisasi sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa akan menjadi kunci awal pencapaian manfaat sebesar-besarnya masyarakat dan pemerintah desa. (Wijaya, David 2018)

Salah satu basis pengembangan ekonomi desa yang diharapkan bisa berkembang dengan memanfaatkan potensi lokal ialah kelembagaan BUMDes. BUMDes kedepan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal di pedesaan. Bahkan, di beberapa desa dan daerah, BUMDes tidak hanya menjadi penggerak ekonomi tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen sosial dan menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal. Pelembagaan BUMDes diharapkan tidak memengaruhi upaya desa membentuk lembaga perekonomian perdesaan. Saat ini, yang paling penting adalah mengupayakan tumbuhnya usaha desa yang mampu memberikan manfaat bagi warga desa baik secara langsung dan tidak langsung. Pelembagaan BUMDes dapat melekat dalam pandangan dan aktivitas warga masyarakat sehingga pada akhirnya BUMDes serta unit-unit usaha yang diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari masyarakat. (Wijaya, David 2018)

Pengembangan basis ekonomi perdesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti diinginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya ialah menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme dari kelembagaan ekonomi pada perdesaan tidak berjalan efektif serta berimplikasi terhadap ketergantungan dengan bantuan pemerintah sehingga bisa mematikan semangat kemandirian. (Wijaya, David 2018)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018, saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35.000 dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. (www.lensatimurnews.com)

Gambar 1.1 Data BUMDes di seluruh Indonesia



Sumber : www.lensatimurnews.com

Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas peluang usaha rumahan yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih ‘sedikitnya’ pemahaman BUMDes

pada sebagian besar kepala desa. Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (www.berdesa.com).

Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah. Jumlah desa yang menerima dana desa mencapai 74.910. Sampai 2017 lalu, lewat program dana desa telah direalisasikan jalan desa 123.848 km, jembatan 791.258 km, pasar desa 6.576 unit dan BUMDes 26.750 unit kegiatan serta masih banyak lagi pencapaian di berbagai sektor pembangunan. (www.kumparan.com).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan pada umumnya masih tertinggal jauh dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan yang dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan. Oleh karena itu, dalam keadaan kota-kota dewasa ini, semestinya kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya. Daripada menganggap desa dan kota sebagai suatu dikotomi, akan lebih sesuai untuk menjelaskan desa-kota sebagai sebuah fenomena yang bertautan, dimana masyarakat di dalamnya secara bersama memecahkan masalah kemiskinan, perkembangan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Fenomena yang terjadi Desa Melung ini sangat berbeda dengan desa yang lainnya yaitu saat pertama kali mendirikan BUMDes Wisata Pagubugan Melung ini adalah bentuk dari keinginan masyarakat Desa Melung ini sendiri, yaitu dengan bersama-sama dan bergotong-royong mendirikan Wisata Pagubugan Melung secara sukarela tanpa diberi upah sedikitpun, para masyarakat Desa Melung yang bekerja sebagai relawan pendirian wisata pagubugan melung ini bertahan selama satu tahun lamanya dalam bekerja untuk mendirikan Wisata Pagubugan Melung, tetapi semakin kesini yaitu dari hari ke hari para relawan Masyarakat Desa Melung yang turut berperan dalam mendirikan BUMDes semakin berkurang dikarenakan tidak diberikannya imbalan berupa upah atau balasan apapun, sehingga masyarakat Desa Melung ini berpindah ke tempat kerja yang lainnya yaitu dengan adanya imbalan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sampai saat ini hanya tersisa 5 orang yang turut berperan dengan bekerja sebagai pengelola Wisata Pagubugan Melung, dengan adanya imbalan atau gaji yang cukup tinggi. Lalu untuk ide dari adanya fasilitas yang ada di Wisata pagubugan melung ini adalah hasil dari pemikiran masyarakat Desa Melung yaitu seperti kolam renang di tengah sawah, ini adalah salah satu ide dari Masyarakat Desa Melung.

Desa Melung adalah salah satu dari 14 desa di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Desa Melung merupakan sebuah desa yang terletak di lereng kaki Gunung Slamet. Desa dengan jumlah penduduk 4.962 jiwa (data desa 2020) Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan hutan negara (Perhutani). Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ketenger dan Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kutaliman dan sebelah barat berbatasan dengan Desa

Windujaya. Di Desa Melung ini untuk sarana transportasi yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. sarana dan prasarana transportasi Desa Melung sudah cukup baik sebagai prasarana perhubungan jalan ditambah sekarang ini sudah ada sarana transportasi angkutan pedesaan untuk mengangkut hasil bumi dari desa ke kota.

Kondisi desa melung yaitu desanya dekat dengan jalan raya sehingga ramai dan dipadati oleh kendaraan bermotor. Lalu mata pencaharian di desa melung ini rata-rata bekerja sebagai petani dan serabutan.

Desa Melung merupakan kawasan pengembangan produksi sayur organiknya dimana berdekatan dengan Curug Gede dan lokawisata Baturraden, wisata teknik PLTA Ketenger yang berada di Desa Melung sangat memungkinkan untuk dijadikan kawasan agrowisata sebagai salah satu penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Tetapi karena adanya hambatan dana yang masih belum terkumpul dan belum mencapai target yang sudah ditetapkan, maka desa melung ini akan berusaha mengumpulkan dana secara teratur dan terorganisir, dan dengan adanya pemasukan-pemasukan yang ada, maka akan segera di kumpulkan secara maksimal agar bisa mendirikan BUMDes selanjutnya yang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Ketua BUMDes dan masyarakat Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Lalu tidak hanya dengan hambatan dana saja yang sedang terkendala tetapi ada juga dari masyarakat desa melung ini yaitu ketika adanya suatu bencana yang menimpa, maka banyaknya bantuan-bantuan yang berdatangan dari luar, dan bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang lebih

membutuhkan, tetapi dengan adanya bantuan tersebut tidak semua masyarakat desa ini menerima bantuan secara rata. Maka dengan adanya sosialisasi pemerintah desa kepada ketua RT dan RW dan lembaga-lembaga yang ada di desa melung ini, untuk bisa memberi pemahaman kepada Masyarakat Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tentang bantuan yang dibagikan secara tidak merata tersebut agar bisa memahami yang sudah disampaikan oleh pemerintah desa dan meminimalisir adanya kecemburuan sosial.

Wisata melung adalah BUMDes yang terletak di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Wisata ini beroperasi mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan tiket masuk Wisata Melung saat ini hanya sebesar Rp 7.000 per orang lalu untuk parkir roda dua Rp. 2000 dan untuk parkir roda empat Rp 5.000. Dengan harga tiket tersebut, pengunjung bebas menikmati Wisata Melung yang ada, lalu pengunjung juga bisa menikmati salah satu tempat favorit para pengunjung yaitu kolam renang yang berada di tengah sawah.

Menurut Pak Kartim selaku Ketua Bumdes Wisata Melung, kolam renang tersebut diperuntukkan untuk anak-anak dan dewasa. Kedalaman kolam renang untuk dewasa 130 cm dan untuk anak-anak 60 cm. Air kolam renang bersumber dari mata air pegunungan dan kolam renang ini dikuras 3 kali dalam satu pekan. Hal ini sekaligus menjadi keunggulan tersendiri, karena kolam renang ini tidak menggunakan kaporit sama sekali. BUMDes ini dimanajeri oleh Kartim.

Gambar 1.2 Kolam Renang



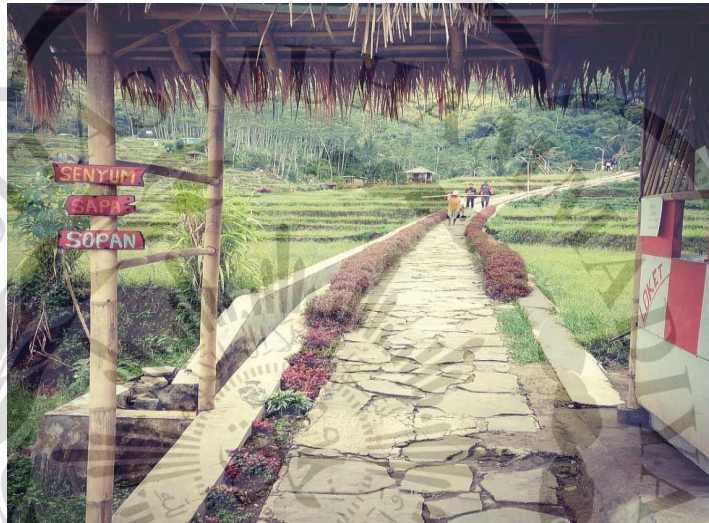
Sumber: https://www.instagram.com/desa_wisatamelung/?hl=id

Fasilitas yang ada di Wisata Melung diantaranya yaitu, terdapat Pendopo yang biasanya digunakan untuk mengadakan acara atau petunjukan yang menarik yang diadakan setiap kali oleh wisata melung ini, lalu ada juga Gazebo sebanyak 12 unit ini juga dapat dijadikan tempat bersantai para pengunjung dan sembari menikmati keindahan desa melung, kemudian ada grojogan benkok sekelas air terjun yang kecil ini bisa juga digunakan untuk spot foto lalu ada juga hamparan sawah yang luas ini untuk spot foto selfie para pengunjung yang sembari menikmati keindahan alam wisata melung ini, dan yang menjadi khas di wisata ini yaitu terdapat kolam renang di tengah tengah sawah untuk menjadikan pengunjung bisa lebih menikmati wisata melung ini.

BUMDes yang sudah ada saat ini di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas hanya satu, yaitu Wisata Melung.

Wisata Melung ini akan dikembangkan lagi dengan ditambahkan kolam renang yang berada di tengah-tengah sawah, tentunya dengan dukungan dan persetujuan pemerintah desa atau kepala desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Gambar 1.3 Tiket Masuk



Sumber : https://www.instagram.com/desa_wisatamelung/?hl=id

Gambar 1.4 Wisata Melung



Sumber : https://www.instagram.com/desa_wisatamelung/?hl=id

Gambar 1.5 Grujungan Bengkok



Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3756707/geliat-desa-melung-banyumas-kembangkan-potensi-wisata>

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Badaruddin et al. (2017) yang memperoleh hasil menunjukkan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan ditawarkan model alternatif implementasi modal sosial berbasis CSR melalui "Model Kerja Kolaborasi" dan pemberdayaan masyarakat pedesaan hanya akan bekerja dengan baik jika di masyarakat masyarakat memiliki modal sosial yang kuat sehingga modal sosial digunakan dalam hubungan sosial yang mereka bangun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberdayakan masyarakat desa. Melalui komunitas, pemberdayaan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Terkait pemberdayaan masyarakat berorientasi desa yang pedesaan, UU Desa juga menyatakan bahwa Badan Usaha Desa (*BUMDes*) adalah lembaga ekonomi yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Selain orientasi ekonomi, *BUMDes* juga diharapkan menjadi alat untuk merajut bersama (kolektivitas) masyarakat

desa. Untuk mewujudkan harapan ini, perlu memberdayakan masyarakat desa, di mana *BUMDes* dapat digunakan sebagai alat dalam proses pemberdayaan. Agar pemberdayaan masyarakat desa melalui *BUMDes* berjalan dengan baik, dalam pembentukan dan implementasi, nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal) masyarakat desa harus dimanfaatkan dan diberdayakan. Dalam konteks ini, UU Desa telah menanggapi penggunaan nilai-nilai sosial budaya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Respon Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang desa terhadap kearifan lokal dapat dilihat dari filosofi UU Desa yang akan menghidupkan kembali sosial budaya nilai-nilai (kearifan lokal) masyarakat desa yang dapat diwujudkan melalui potensi modal sosial yang ada.

Pentingnya penelitian ini dilakukan, jika dilihat dari permasalahan di Desa Melung yaitu adanya hambatan dana maka dari itu dengan mewujudkan cita-cita luhur UU Desa, maka program pemberdayaan masyarakat desa diharapkan menjadi prioritas bagi pembangunan desa. Untuk memberdayakan masyarakat desa, potensi modal sosial yang ada di masyarakat desa harus dimanfaatkan sehingga memberikan hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan (ekonomi, sosial, dan budaya) untuk semua penduduk desa. Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) adalah salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka. Dengan itu maka akan terciptanya atau didirikannya *BUMDes* selanjutnya secara merata di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, agar

terciptanya desa yang lebih unggul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam program pemberdayaan masyarakat potensi modal sosial di masyarakat desa harus dimanfaatkan sehingga keberhasilan program pemberdayaan bisa lebih baik. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi media untuk memanfaatkan potensi modal sosial yang ada, baik dalam pembentukan maupun implementasi BUMDes.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Badaruddin et al. (2017) karena dalam penelitian Badaruddin ini selain berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penelitiannya juga menghasilkan dan membahas lebih dalam tentang partisipasi masyarakat desa mempunyai peranan penting dalam memperkuat BUMDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Badaruddin et al. (2017) yaitu dalam penelitian Kariano tentang nilai-nilai kearifan lokal mempengaruhi perkembangan BUMDes sedangkan dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Karena antar satu penelitian dengan penelitian lain terlihat berbeda, maka ada suatu ciri tertentu untuk mendefinisikan partisipasi masyarakat yaitu tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam mempengaruhi perkembangan BUMDes sedangkan BUMDes rata-rata bisa dilihat sebagai sebuah lembaga ekonomi masyarakat desa dan dipandang sebagai sebuah kearifan lokal.

Tiballa, Riyanti (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap

pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Cahya, et al. (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa bentuk partisipasi publik terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam hasil pengembangan, dan partisipasi dalam evaluasi.

Hasanah, Niswatun (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi atau lembaga. Adapun Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Bentuk upaya ini merupakan *Sosio-culture* yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat.

Rafael, et al. (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa keinginan tahap pertama dalam model pemberdayaan berjalan dengan baik. Keinginan dalam upaya pemberdayaan (penguatan) saat ini hanya dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Sangadi kepada pengurus BUMDes dengan ini terlihat dari kegiatan studi banding di luar daerah. Tahap kepercayaan dalam pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat sangat penuh diberikan kepada orang-orang yang ditunjuk secara langsung dan khusus dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, tetapi kepercayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan tahap pemberdayaan (penguatan) belum dilakukan. Khusus untuk setiap papan BUMDes. Tahap kepercayaan dalam model pemberdayaan masih harus ditingkatkan lagi, kepercayaan setiap dewan BUMDes hanya terbatas mampu mengelola tetapi soal kreativitas dan inovasi dalam manajemen dan pengembangan BUMDes sampai sekarang belum tercipta. Tahap kredibilitas dalam model pemberdayaan bukanlah masalah dalam manajemen dan pengembangan dan dewan telah mampu menunjukkan kinerjanya melalui kegiatan BUMDes yang masih berlangsung Pada tahap ini tanggung jawab dewan harus ditingkatkan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, meskipun pemerintah sering membantunya, tetapi dewan penuh bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Pada tahap ini, komunikasi di dalam organisasi harus menjadi perhatian pemerintah dan dewan BUMDes harus mengadakan resmi pertemuan untuk dihadiri oleh BPD, pemerintah dan dewan yang berisi laporan kinerja, agenda kinerja BUMDes.

Jepri, Aprianus (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pasar desa Landungsari dilakukan dengan cara pengelolaan pasar desa diarahkan pada sistem pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian di desa. VGA, Nikita Amalia et al. (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Malia, et al. (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Partisipasi Desa dalam mengembangkan objek wisata Pantai 9 dalam rangka menyukseskan program Visit Sumenep 2018 dibagi atas tiga macam, yang pertama adalah partisipasi masyarakat desa, yang kedua adalah alokasi dana desa dan yang ketiga adalah partisipasi pemerintah dalam melibatkan Pantai 9 untuk menyukseskan program Visit sumenep 2018. Hilman, et al. (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil tentang Pengelolaan desa wisata di Desa Mendak baik pada obyek wisata dan potensi wisata alam jalur pendakian puncak Tapak Bima yang harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pengelolaan.

Kurniawanto, et al. (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Faktor pendorong BUMDes desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan BUMDes melalui pemberdayaan.

Hidayat, Angger et al. (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa masyarakat yang upaya pemberdayaan dilakukan oleh pemangku kepentingan desa belum optimal karena beberapa pemangku kepentingan desa wisata masih belum memberikan komitmen yang kuat dan mereka belum mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat.

Judul dalam penelitian ini yaitu peran partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes. Peran disini adalah peran partisipasi masyarakat desa kaitannya dalam mengembangkan BUMDes. Partisipasi masyarakat desa yang dimaksud adalah hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam mengembangkan BUMDes.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih menjadi sorotan yaitu partisipasi masyarakat desa berperan penting dalam memperkuat BUMDes serta pengembangan Bisnis Desa (BUMDes) yang perlu terus ditingkatkan. Lalu bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi buah pikir, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan harta benda aspek keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang penting dalam mengembangkan atau memajukan BUMDes, sehingga partisipasi masyarakat merupakan strategi yang penting dalam proses mengoptimalkan pengembangan BUMDes. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pengembangan BUMDes, karena sumber daya dan adanya keunikan tradisi dan budaya yang melekat tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan BUMDes. Keberhasilan pengembangan BUMDes tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat desa. Masyarakat desa berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan BUMDes dalam keseluruhan tahapan mulai tahap

perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Dari latar belakang ini, pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu dengan meneliti tentang Bagaimana implementasi program BUMDes di Desa Melung dan juga Bagaimana keterlibatan masyarakat desa dalam implementasi program BUMDes. Serta ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengembangan BUMDes” di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melung Kecamatan Melung Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peran pengurus BUMDes dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melung Kecamatan Melung Kabupaten Banyumas?

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti hanya dapat mengkaji tentang peran partisipasi masyarakat desa, pengurus BUMDes dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) studi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pengurus BUMDes dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan akan menambah informasi dan wawancara mengenai kajian ilmu sosial dan menambah literatur ilmu-ilmu sosial dalam memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat mengembangkan keilmuan dan sebagai bahan informasi untuk penulisan-penulisan yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Pedesaan

Dapat memberikan informasi, wawancara, dan juga pengetahuan manfaat baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pemerintah Desa Melung agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi landasan berpijak dan referensi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberi informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa, dan masyarakat bisa menjadi investor atau berkunjung ke Wisata Melung.

4. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan perbaikan dalam program BUMDes agar bisa mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi berkembangnya perekonomian desa.